

**Judul** : Rencana Pembangunan Gedung Baru Bukan Proyek Untuk Anggota DPR  
**Tanggal** : Senin, 04 Mei 2015  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

**FADLI ZON, Wakil Ketua DPR**

# Rencana Pembangunan Gedung Baru Bukan Proyek Untuk Anggota DPR

Kinerja DPR belum maksimal, tapi lembaga yang dikomando Setya Novanto itu sudah minta gedung baru. Makanya banyak kalangan mengkritisi rencana tersebut.

**APALAGI** Ketua DPR Setya Novanto pernah bilang rencana pembangunan gedung baru DPR itu sudah disetujui Presiden Jokowi. Tapi Wapres JK membantah bahwa Presiden sudah menyetujuinya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, rencana pembangunan gedung yang telah menjadi polemik di tengah masyarakat ini bukan ajang mencari proyek bagi para wakil rakyat di DPR.

"Ini suatu proses yang harus dilaksanakan transparan. Bukan cari proyek-proyek. Itu prinsipnya," kata Fadli Zon kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (30/4).

Secara prinsip, lanjut Wakil

jumlah tenaga ahli, staf, yang dulu hanya dua orang kini sudah menjadi tujuh orang.

**Gedung baru itu nanti untuk apa saja?**

Itu untuk ruang anggota, museum dan perpustakaan.

**Memang bagaimana dengan ruang anggota DPR sekarang ini?**

Kondisi ruangan sudah tak efektif lagi. Ruang anggota DPR menyatu dengan ruang tenaga ahli dan sekretaris pribadi. Sementara jumlahnya banyak.

Dengan penambahan orang yang cukup besar itu, tidak bisa ditampung lagi. Nanti gedung baru itu ada perpustakaan, museum, ada ruang penelitian, dan ruang kerja untuk tenaga ahli.

**Siapa yang mengusulkan ide pembangunan gedung baru DPR itu?**

Saya turut mengusulkan adanya museum dan perpustakaan DPR. Kita inginkan perpustakaan dan museum.

**Apakah Anda turut menangani pembangunan gedung DPR?**

Meski saya turut mengusulkan, rencana pembangunan gedung baru itu yang menangani adalah Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan Kesejahteraan DPR, bukan pimpinan DPR. Museum dan perpustakaan DPR sebenarnya sudah ada sejak lama, namun perlu diperbaiki. Museum berada di lantai II gedung paripurna dan perpustakaan di belakang gedung Nusantara II.

Kita kan memang tidak tahu

soal teknis, tapi kalau prinsip ada kebutuhan sarana dan prasarana pendukung itu dibicarakan di BURT dan kesejahteraan. Kalau anggota DPR kan nggak ada yang pegang uang.

**Apakah pembangunan ini akan transparan?**

Ini tentu suatu proses yang harus dilaksanakan transparan, bukan cari proyek-proyek.

**Presiden sudah menyetujui?**

Kita sudah tulis surat kepada presiden dan presiden sudah ada jawaban dan tidak ada masalah. Karena ini kan untuk menunjang kinerja, sehingga pada prinsipnya tidak ada masalah. Yang paling penting dalam pembuatan gedung itu jangan ada korupsi, jangan ada proyek-proyek. Saya kira itu yang harus kita awasi bersama. ■ KW

